

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 28 Juni 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Hal. 7)	Jumat, 28 Juni 2019	LMAN Bayar Rp 397 Miliar	Untuk pembebasan lahan proyek bendungan tahun anggaran 2018
2	Bisnis Indonesia (Hal. 4)	Jumat, 28 Juni 2019	Belanja K/L Dipangkas	Pagu indikatif untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2020 turun 0,2% dibandingkan dengan APBN 2019
3	Kompas (Hal. 3)	Jumat, 28 Juni 2019	Hunian bagi Generasi Milenial Diidentifikasi	Pemerintah tengah mengidentifikasi kelompok milenial sebagai dasar penyusunan skema pembiayaan yang sesuai
4	Koran Tempo (Hal. 25)	Jumat, 28 Juni 2019	Kuota Rumah Bersubsidi Menipis	Jatah pembiayaan tak mencukupi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5	Kompas (Hal. 3)	Jumat, 28 Juni 2019	Jembatan Teluk Kendari untuk Percepat Konektivitas	Pembangunan jembatan Teluk Kendati sepanjang 1,34 KM ditargetkan tuntas pada Februari 2020
6	Koran Tempo (Hal. 25)	Jumat, 28 Juni 2019	Konstruksi Jalan Tol Pertama di Sulawesi Utara Capai 70 Persen	Untuk pembangunan tol Manado-Bitung sampai akhir Juni 2019 telah mencapai 70,38 persen
7	Koran Tempo (Hal. 20)	Jumat, 28 Juni 2019	Program Baru Penanganan Sampah di Ibu Kota Perlu Payung Hukum	Daya tampung PTSP Bantargebang sudah menembus 80 persen
8	Media Indonesia (Hal. 16)	Jumat, 28 Juni 2019	Bogor Bangun Kota Zonasi	Zonasi memfokuskan pembangunan dengan pembagian wilayah pelayanan atau jasa, perdagangan dan permukiman
9	Media Indonesia (Hal. 16)	Jumat, 28 Juni 2019	Inovasi Kunci Majukan Pariwisata	Sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan untuk dapat menyumbang devisa negara

Judul	LMAN Bayar Rp 397 Miliar	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 7)		
Resume	Untuk pembebasan lahan proyek bendungan tahun anggaran 2018		

► PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN

LMAN Bayar Rp397 Miliar

Bisnis, JAKARTA — Sampai dengan Juni 2019, Lembaga Manajemen Aset Negara telah membayar biaya pembebasan lahan proyek bendungan tahun anggaran 2018 senilai Rp397 miliar.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan bahwa realisasi pembayaran terdiri atas pembayaran langsung dan dana talangan tanah yang ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor. "LMAN sudah membayar Rp397 miliar dari yang ditagihkan saat ini mencapai Rp683 miliar," kata Rahayu kepada *Bisnis*, Kamis (27/6).

Adapun, sebanyak 953 bidang tanah telah terbayar dan hal ini setara dengan 3,57% dari total Rp11,12 triliun alokasi tahun 2018.

Sementara itu, apabila diperinci, dana yang ditagihkan kepada LMAN adalah Rp2,19 triliun pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan realisasinya sejumlah Rp2,18 tri-

lun. "Sebesar 91,55% telah terealisasi dari total Rp2,378 triliun alokasi tahun 2017."

Dari pembayaran ini, sebanyak 7.217 bidang tanah telah terbayar.

Adapun, daftar bendungan yang pengadaan lahannya dibiayai oleh LMAN adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kuningan, Tapin, Way Sekampung, Ladongi, Gongseng, Pidekso, Mangatiga, Karian, Clawi, Tigup, Paseloreng, Sukamahi, Tigadihaji, dan Keureuto.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, Kementerian PUPR akan menyelesaikan target pembangunan 65 bendungan yang terdiri atas 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

Jika diperinci lebih lanjut, progres dari target 49 bendungan baru itu adalah 8 sudah selesai dibangun, 32 masih dalam proses pengerjaan, dan 9 baru

direncanakan.

Sementara itu, dari 16 bendungan lanjutan progresnya adalah sebanyak 9 bendungan sudah selesai dibangun dan 7 masih dalam pembangunan.

Bendungan yang telah rampung yakni Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jabar), Rajulmati (Jatim), Nipah (Jatim), Titah (Bali), Poya Seunara (Aceh), dan Teritip (Kalim). Selanjutnya, bendungan yang masih dalam pembangunan adalah Raknomo (NTT), Tanju (NTB), Milla (NTT), Rotiklod (NTT), Logung (Jateng), Sei Gong (Kepri), dan Sindangheula (Banten).

Sementara itu, 15 bendungan baru yang akan selesai tahun ini yaitu Gongseng, Karalloe, Tapin, Paseloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, dan Ladongi, Napun Gete, Clawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan. *(Putra P. Khairati)*

Judul	Belanja K/L Dipangkas	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 4)		
Resume	Pagu indikatif untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2020 turun 0,2% dibandingkan dengan APBN 2019		

► PAGU APBN 2020

Belanja K/L Dipangkas

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan besaran pagu indikatif untuk alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun depan hanya Rp854 triliun, atau turun 0,2% dibandingkan dengan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp855,4 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa belanja K/L pada 2020 didesain untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Usulan ini masih bersifat sementara," ujarnya di sela rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Besaran penurunan belanja K/L yang diajukan tersebut merupakan penurunan pertama kali terjadi sejak 3 tahun belakangan.

Tercatat, pada 2019, anggaran belanja K/L sebesar Rp855,4

triliun, naik 1% dibandingkan dengan realisasi 2018 yang sebesar Rp846,6 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran pada 2018 sebesar Rp846,6 triliun tersebut naik 10,6% dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar Rp765,1 triliun.

Askolani menjelaskan bahwa penurunan pada belanja K/L dilakukan karena fokus pemerintah dalam melakukan *good spending* atau belanja lebih efisien dan efektif pada tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan prinsip *value for money*, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat untuk pembangunan Indonesia.

Khusus untuk belanja modal, pemerintah berkomitmen meningkatkan porsi belanja modal pada tahun depan untuk mewujudkan pengembangan kapasitas produksi dan konektivitas.

Askolani mengatakan bahwa untuk mempertahankan pertum-

buhan belanja modal sangat tergantung dengan kapasitas fiskal.

"Bukan susah ditingkatkan. Kalau kita lihat kan sejak periode 5 tahun ke belakang itu sudah naik dibandingkan dengan 2014. Nah setelah alami kenaikan tentunya kan untuk mempertahankan kenaikan itu sangat tergantung dengan kapasitas fiskal," ujarnya.

Askolani mencontohkan, pemerintah pernah menaikkan belanja modal secara signifikan pada 2015. Saat itu, memindahkan dana dari subsidi energi ke belanja yang produktif.

Dia menjelaskan, kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah sangat bergantung dengan kecepatan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan keseimbangan dengan pos belanja lain yang memang harus diperhatikan, termasuk belanja pegawai, belanja subsidi dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). (Puput

Ady Sukarno)

Judul	Hunian bagi Generasi Milenial Diidentifikasi	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Kompas (Hal. 3)		
Resume	Pemerintah tengah mengidentifikasi kelompok milenial sebagai dasar penyusunan skema pembiayaan yang sesuai		

PERUMAHAN

Hunian bagi Generasi Milenial Diidentifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan tempat tinggal atau hunian saat ini didominasi oleh pekerja muda yang sering disebut sebagai generasi milenial. Pemerintah tengah mengidentifikasi kelompok ini sebagai dasar penyusunan skema pembiayaan yang sesuai.

Berdasarkan riset Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), generasi milenial mengutamakan hunian berkualitas berupa apartemen atau hunian sewa di pusat kota yang terintegrasi dengan simpul

transportasi umum dan memiliki akses internet.

Generasi milenial diidentifikasi sebagai mereka yang lahir tahun 1980 sampai 2000. Saat ini jumlahnya sekitar 30 persen atau 81 juta jiwa dari total penduduk Indonesia dan akan terus bertambah ke depan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Kamis (27/6/2019), mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan bagi kelompok milenial. Pemerintah membagginya

menjadi tiga kelompok berdasarkan rentang usia dan asumsi penghasilan.

Pertama adalah milenial pertama yang berusia 25-29 tahun. Mereka diasumsikan baru bekerja atau masih mencari pekerjaan dan belum menikah. Kedua, milenial berkembang dengan usia 30-35 tahun dan berkeluarga. Ketiga, mereka yang berusia di atas 35 tahun dan sudah punya pekerjaan tetap dengan kemampuan finansial lebih baik.

Pemerintah akan menggandeng banyak pihak untuk mewujudkan. Pemerintah da-

pat memanfaatkan lahan milik negara atau pemerintah daerah untuk menyediakan hunian vertikal. Cara lainnya adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan mendorong peran badan usaha milik negara.

Secara terpisah, pengajar dari Laboratorium Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), M Jehansyah Siregar, berpandangan, solusi penyediaan hunian di perkotaan memang hanya dengan hunian vertikal yang kompak. Kawasan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*)

merupakan salah satu wujudnya. Bagi kelompok milenial, hunian sewa dinilai lebih pas ketimbang kepemilikan.

Meski demikian, pemerintah mesti memisahkan antara kebijakan perumahan rakyat dan kebijakan untuk mendorong bisnis properti. Pemerintah dapat menggunakan anggarannya untuk membangun rumah susun atau apartemen sewa sebanyak-banyaknya, bukan dengan memberikan subsidi sewa, kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Inilah yang disebut sebagai kebijakan perumahan rakyat. (NAD)

Judul	Kuota Rumah Bersubsidi Menipis	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 25)		
Resume	Jatah pembiayaan tak mencukupi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		



Perumahan di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa lalu.

Kuota Rumah Bersubsidi Menipis

Jatah pembiayaan tak mencukupi kebutuhan rumah MBR.

Larissa Huda
larissa.huda@tempo.co.id

JAKARTA — Kuota pembiayaan rumah bersubsidi yang terdiri atas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB) semakin menipis. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Aperisi), Daniel Djumali, memperkirakan kuota tersebut habis dalam tiga bulan ke depan. "Agustus tahun ini sudah habis," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Berdasarkan catatan Aperisi, hingga Mei lalu kuota pembiayaan rumah bersubsidi sudah terpakai untuk 100,8 ribu unit rumah. Kuota total pembiayaan dari pemerintah tahun ini mencapai 168 ribu unit, lebih rendah jika dibanding kuota tahun lalu yang mencapai 292 ribu unit. Walhasil, kata

Daniel, kuota pembiayaan rumah bersubsidi tersisa 67,2 ribu unit. "Bila kuota subsidi habis, pengembang akan menghentikan pembangunan rumah subsidi sehingga sangat merugikan konsumen berpenghasilan rendah," ucap dia.

Tahun, ini pemerintah menaikkan target pembangunan rumah dari 1 juta unit menjadi 1,25 juta unit. Namun jatah pembiayaan rumah malah berkurang. Daniel mengatakan terjadi defisit kuota rumah bersubsidi. "Semestinya dengan kenaikan target pembangunan rumah 25 persen harus ada kuota 365 ribu unit," ucap Daniel.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawi-djaja, menuturkan penurunan kuota pembiayaan rumah bersubsidi berdampak penurunan realisasi pembangunan oleh pengembang hingga 25 persen. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kata

dia, juga akan membayar 40 persen lebih mahal. "Bukan tidak mungkin pembangunan rumah oleh pengembang yang berdasarkan permintaan akan berkurang akibat habisnya kuota pem-

biayaan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan setiap tahun terjadi kenaikan kebutuh-

an rumah 10-15 persen. Tahun lalu, realisasi penyediaan rumah bersubsidi oleh REI mencapai 162 unit ribu dari target 250 ribu unit. Totok menuturkan asosiasi pengembang,

seperti REI, Aperisi, dan Himperra, sepakat meminta tambahan kuota 140 ribu hingga akhir tahun ini. "Namun kami harus bertemu dengan menteri untuk dapat persetujuan agar segera disepakati oleh Kementerian Keuangan," kata Totok.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Adang Sutara, mengklaim kuota pembiayaan rumah bersubsidi masih ada sekitar 40 persen. Namun, kata dia, pemerintah masih menunggu data pasokan dari para pengembang dan bank penyalur pembiayaan rumah bersubsidi. "Baru kami dapat menghitung kecukupan dana FLPP dua-tiga bulan ke depan," ujar Adang.

Ihwal kuota, Adang mengatakan, alokasi pembiayaan sudah dibagi kepada bank penyalur sejak perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) diteken. Menurut Adang, masih ada kuota di beberapa bank penyalur PPDPP segera mengevaluasi target penyaluran bank pelaksana yang tidak tercapai dan mengalihkan target ke bank penyalur yang berkinerja baik.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR, Adang mengatakan, masih ada skema lain yang bisa diambil, yaitu lewat subsidi selisih bunga (SSB) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). "Untuk BP2BT saat ini sedang dalam persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang," kata dia.

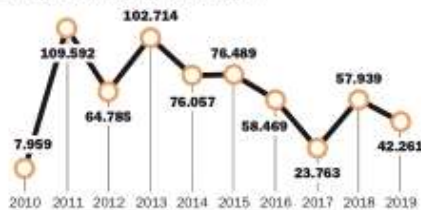
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah terus mendorong pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk mengupayakan penambahan anggaran FLPP. "Namun harus melalui pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," ujar dia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengaku belum bisa menindaklanjuti permintaan pengembang lantaran belum ada pernyataan dari Kementerian PUPR. "Masuk jawab menjadi bahan review kami," kata dia. ●

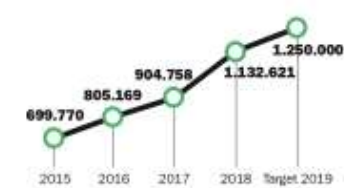
Permintaan Rumah Bersubsidi Melejit

Kebutuhan rumah baru naik 10-15 persen setiap tahun. Namun angka tersebut tidak tercapai karena pengurangan kuota skema pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB).

Jatah Pembiayaan FLPP (Unit)



Pencapaian Program Sejuta Rumah (Unit)



Penyaluran FLPP dan SSB (Ribu Unit)

	Total	FLPP	SSB
2018	292	67	225
2019	168	68	100

LARISSA HUDA
SUMBER: APERISI | KEMENTERIAN PUPR

Judul	Jembatan Teluk Kendari untuk Percepat Konektivitas	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Kompas (Hal. 3)		
Resume	Pembangunan jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 KM ditargetkan tuntas pada Februari 2020		

INFRASTRUKTUR

Jembatan Teluk Kendari untuk Percepat Konektivitas

KENDARI, KOMPAS — Pembangunan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer mencapai 59 persen. Jembatan yang ditargetkan tuntas pada Februari 2020 ini akan mempercepat konektivitas wilayah. Meski begitu, kendala pembebasan lahan masih membayangi penyelesaian jembatan senilai Rp 800,9 miliar ini.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua sisi selatan Teluk Kendari ini terus dilakukan, Kamis (27/6/2019). Tampak pembangunan berlangsung di sisi jalan pendekat dan di tiang utama.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari Yohannis Tulak Todingara mengatakan, keberadaan jembatan akan mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Lama ke Bungkutoko.

"Dari segi waktu pasti akan

sangat singkat karena dari (jarak tempuh saat ini) 25 kilometer (dipangkas) menjadi 1,3 kilometer dengan adanya jembatan," katanya. Ia menambahkan, selain mendukung integrasi kota, kehadiran jembatan juga akan mendukung pariwisata kota di masa depan.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Armen Adekristi menyebutkan, fokus saat ini adalah membangun dua tiang utama setinggi 84 meter. Dua tiang utama itu akan terhubung dengan bentang jalan utama sepanjang 200 meter.

Konstruksi Jembatan Teluk Kendari mulai resmi dikerjakan Agustus 2016. Jembatan senilai Rp 800,9 miliar ini dikerjakan konsorsium PT Pembangunan Perumahan dan PT Nindya

Karya dengan kontrak tahun jamak. Jembatan ini direncanakan memiliki lebar 20 meter yang terdiri atas empat lajur lengkap dengan median jalan dan trotoar.

Di luar progres konstruksi itu, pembangunan Jembatan Teluk Kendari masih terkendala pembebasan lahan. Sebagian besar bidang tanah yang belum bebas itu terdapat di sisi Kota Lama. Pemerintah pusat telah membebaskan 20 bidang lahan pada 2018 dan Pemerintah Provinsi Sultra membebaskan sekitar 30 bidang lahan pada 2015-2017. Masih ada 13 bidang lahan yang belum dibebaskan dan pemprov tidak lagi menganggarkan pembebasan lahan sejak 2018.

"Kami putuskan untuk mengambil alih (pembebasan lahan) tahun ini. Kami ajukan anggaran sekitar Rp 7 miliar

untuk membebaskan 13 bidang lahan itu," kata Armen.

Jembatan Barito

Di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jembatan Barito tengah memasuki tahap pemeliharaan. Sejumlah perbaikan dilakukan pada jembatan sepanjang lebih dari 1 kilometer yang melintasi Sungai Barito dan menghubungkan wilayah Kalsel dan Kalimantan Tengah itu.

Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Jembatan Barito Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin Mirnasari Daulay mengatakan, pemeliharaan Jembatan Barito akan dilakukan tiga bulan hingga September. Pemeliharaan meliputi perbaikan lantai, pengecatan, dan penggantian lampu dengan alokasi biaya mencapai Rp 7,9 miliar. (JUM/JAL)

Judul	Konstruksi Jalan Tol Pertama di Sulawesi Utara Capai 70 Persen	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 25)		
Resume	Untuk pembangunan tol Manado-Bitung sampai akhir Juni 2019 telah mencapai 70,38 persen		

Konstruksi Jalan Tol Pertama di Sulawesi Utara Capai 70 Persen

ANTARA/ADWIT B PRAMONO



Proyek jalan tol Manado-Bitung di Manado, Sulawesi Utara, 2 Maret lalu.

JAKARTA — Pekerjaan fisik (konstruksi) semua seksi di jalan tol Manado-Bitung sampai akhir Juni 2019 telah mencapai 70,38 persen. Adapun pembebasan lahannya mencapai 86,15 persen. "Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2020," kata Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung, George IMP Manurung.

George mengatakan pembebasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Lahan yang dibebaskan di area tertentu belum tersambung sehingga berdampak kurang maksimalnya pembangunan konstruksi. Menurut dia, faktor penghambat pembebasan lahan selama ini adalah persoalan harga tanah dan administrasi, seperti kelengkapan dokumen atau sertifikat tanah. "Sekarang tinggal masalah administrasi, misalnya dokumennya belum lengkap atau harus melalui ahli waris. Tidak sedikit yang harus dititipkan ke pengadilan, konsinyasi," kata dia.

George menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dirampungkan pada triwulan III 2019. Dengan target tersebut, proses konstruksi juga akan dipercepat untuk mencapai target penyelesaian proyek. Sejauh ini, jalan tol Manado-Bitung sudah beroperasi secara fungsional sepanjang 14 kilometer untuk membantu kelancaran arus transportasi kendaraan kecil pada masa libur Natal 2018, tahun baru 2019, dan Lebaran 2019. "Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat," ujar George. ● LARISSA HUDA

Judul	Program Baru Penanganan Sampah di Ibu Kota Perlu Payung Hukum	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 20)		
Resume	Daya tampung PTSP Bantargebang sudah menembus 80 persen		

Program Baru Penanganan Sampah di Ibu Kota Perlu Payung Hukum

Daya tampung PTSP Bantargebang sudah menembus 80 persen.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah Jakarta mengajukan draf revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Revisi itu dibutuhkan sebagai payung hukum atas sejumlah program baru pengelolaan sampah di Ibu Kota. Program baru ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah setelah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang semakin terbatas.

Untuk menjalankan pro-

gram baru yang dinamai Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) itu, pemerintah terhambat dasar hukum untuk masalah pembiayaan. "Karena itu kami butuh revisi perda ini," kata pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Andono Warih, kemarin.

Daya tampung PTSP Bantargebang saat ini mencapai 39 juta ton atau memenuhi 80 persen dari total kapasitas atau sekitar 49 juta ton. Volume rata-rata pengiriman sampah dari Ibu Kota mencapai 7.452 ton per hari. Dengan fakta itu, PTSP Bantargebang diprediksi kelebihan muatan pada

2021.

Raperda ini juga akan menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI untuk bekerja sama dengan BUMD dan swasta dalam pengadaan serta pengoperasian *intermediate treatment facility* (ITF). Pembangunan ITF atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sunter yang memasuki tahap konstruksi diprediksi baru beroperasi pada 2022. "Pengelolaan sampah nantinya merupakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat," kata Andono.

Sejumlah fraksi di parlemen Jakarta juga telah mendukung draf raperda yang diajukan Gubernur Anies Baswedan itu. Anggota Fraksi Partai Ge-

rindra, Jimmy Alexander Turangan, misalnya, menilai pemerintah harus berfokus pada pengelolaan sampah secara modern. Salah satu cirinya adalah pemilahan jenis dan cara pengelolaan sampah. "Sebagai contoh, sampah jenis organik diolah menjadi energi alternatif dan kompos; sampah jenis anorganik didaur ulang, dimusnahkan, serta dijual secara aman dan legal."

Adapun anggota Fraksi Demokrat-PAN, Bambang Kusumanto, menilai pemerintah juga harus memikirkan cara untuk mengurangi volume atau produksi sampah harian oleh masyarakat Ibu Kota. "Revisi perda lebih dite-

kan pada pembenahan di proses akhir pengolahan sampah di ITF. Padahal, sampah akan lebih mudah diproses apabila volume sampah dapat dikurangi secara masif."

Di sisi lain, Wakil Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin, lebih menyoroti pelaksanaan program yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dia menyatakan jangan sampai pengelolaan sampah hanya sebatas penyebaran wacana yang tak kunjung rampung. "Kami berharap ITF dapat segera terwujud, sehingga volume sampah yang jumlahnya 7.700 ton per hari dapat tertangani."

Sementara itu, Fraksi Partai PKB memilih untuk menunda dukungan

dengan klaim harus mempertimbangkan dan mengkaji kembali draf raperda tersebut. Terutama perihal rencana kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan swasta dan BUMD dalam pengadaan dan pengoperasian pengolahan sampah.

"Kami melihat perusahaan yang ditunjuk sebagai pihak lain masih belum memenuhi beberapa persyaratan dalam melakukan pengelolaan tersebut. Selain itu, pembiayaan yang akan diberikan dapat menambah beban belanja daerah, terutama biaya pengelolaan sampah," ujar Muallif Z.A., Wakil Ketua Fraksi PKB.

● ANTARA

Judul	Bogor Bangun Kota Zonasi	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 16)		
Resume	Zonasi memfokuskan pembangunan dengan pembagian wilayah pelayanan atau jasa, perdagangan dan permukiman		

Bogor Bangun Kota Zonasi

PEMERINTAH Kota Bogor segera memulai pembangunan perwajahan baru dengan konsep zonasi. Salah satunya mendirikan kawasan baru atau disebut *small city*. Kota Bogor berwajah baru ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan. “Akan banyak perubahan. Hal ini untuk mengurangi beban pusat kota,” papar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bogor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Rancangan penataan kota dengan konsep zonasi sebenarnya sudah diwacanakan Bima Arya sejak periode pertama dirinya menjadi Wali Kota Bogor pada 2014-2019. Namun, itu baru terealisasi pada periode kedua menjadi Wali Kota Bogor. Rancangan kota wajah baru telah masuk ke program RPJMD. RPJMD akan diperkuat dengan cara membuat zonasi

Zonasi memfokuskan pembangunan dengan pembagian wilayah pelayanan atau jasa, perdagangan, dan permukiman.

Kota Bogor. “Kenapa zonasi? Sebab, Kota Bogor berantakan. Tidak ada ketegasan soal zonasi dan pelayanan,” ungkap Bima. Zonasi yang disebut Bima ialah memfokuskan pembangunan dengan pembagian wilayah pelayanan atau jasa, perdagangan, dan permukiman. Nantinya, wilayah Bogor Utara, khususnya Kelurahan Kedung Halang sebagai pusat perniagaan baru. Tujuannya mengurangi beban pusat kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor, Erna Hernawati, lebih jauh merinci seputar *small city*. Bukan memindahkan pusat kota ke Bogor Utara, tetapi lebih pada penyeimbang dari pusat kota. “Pusat kota sudah *full* dan fasilitas sudah oke sehingga perlu penyebaran dan pengembangan,” ungkapnya, kemarin. Pihaknya akan membuat *central bussines district* di pinggiran wilayah pembangunan D (WPD) dan WPC (wilayah pembangunan C) kawasan Tanah Sareal serta Bogor Utara, sedangkan WPE bakal ada jalan tembus di Km 42 dan Km 43. WPE dimulai dua atau tiga tahun lagi. Masih dari acara Musrenbang Kota Bogor, Direktur Marketing Olympic City Imelda Fransisca memaparkan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 25 hektare untuk dibangun mal, perumahan, dan apartemen dalam satu kawasan. (DD/J-1)

Judul	Inovasi Kunci Majukan Pariwisata	Tanggal	Jumat, 28 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 16)		
Resume	Sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan untuk dapat menyumbang devisa negara		

Inovasi Kunci Majukan Pariwisata

SEKTOR pariwisata merupakan salah satu unggulan pemerintah dengan menyumbang devisa negara terbesar setelah gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit. Yakni sebesar Rp224 triliun atau memberi kontribusi 5,25% PDB nasional.

Untuk memajukan sektor pariwisata, pemerintah daerah diminta berinovasi.

“Kita memiliki pantai, laut, gunung berjumlah 717.110 ribu. Lalu ada 300 suku, 742 bahasa, dan enam situs warisan dunia. Ini menjadi potensi besar. Bila dikemas baik, destinasi wisata di daerah bisa menarik kunjungan wisatawan berulang-ulang,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat membuka Trisakti Tourism Award Desti-

nasi Indonesia Expo and Conference di Jakarta, kemarin.

Ia pun menekankan pentingnya inovasi. Tanpa inovasi, lanjutnya, potensi wisata suatu daerah bakal mati.

“Tingkat keramahtamahan masyarakat termasuk unsur penting, juga ketersediaan infrastruktur,” imbuhnya.

Mendagri mengungkapkan, selain minim inovasi, permasalahan lain yang masih dihadapi dan harus segera diselesaikan, yakni masih terjadi tumpang-tindih dalam pengelolaan objek wisata. Satu objek wisata bahkan dikelola lebih dari tiga institusi.

Menurutnya, hal tersebut selain memboroskan anggaran, juga mengakibatkan pengelolaan destinasi wisata tidak

maksimal. Kondisi itu diperburuk minimnya inovasi.

Ia menunjuk Candi Borobudur yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang, badan otorita yang mengurus kepurbakalaan, dan badan otorita yang mengurus karya sejarahnya.

“Untuk menatanya memang ribet. Tapi kalau dibiarkan, lama-kelamaan semakin tidak bisa berkembang dan anggaran habis di sana saja. Bagaimana bisa maju,” cetusnya.

Ia menambahkan, potensi besar sumber daya alam (SDA) dan budaya akan rapuh jika tidak dijaga dengan baik. Budaya dan SDA seharusnya menyatu pada kerangka hukum pemerintahan.

Selain itu, destinasi wisata baru hendaknya didukung aksesibilitas dan fasilitas memadai serta peningkatan pariwisata melalui pengembangan budaya dan keanekaragaman. (Sru/H-1)